

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

a. Indikator Inisiatif Pemerintah

Regulasi terkait program percepatan penurunan stunting yang ada belum mengatur secara spesifik terkait program – program tersebut. Hal ini belum sesuai dengan mandat dari Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 bahwa strategi percepatan penurunan stunting harus diselaraskan dengan peningkatan komitmen, dan visi kepemimpinan dari setiap lembaga.

b. Indikator Prioritas Kebijakan

Pemerintah Kota Depok sudah melakukan kajian mendalam terkait penurunan stunting, serta kajian yang dilakukan dapat dikatakan relevan karena didapatkan dari hasil forum hingga tingkat desa untuk mendapatkan aspirasi tersebut. Hal ini selaras dengan Panduan 8 Aksi Integrasi bahwa kajian harus dilakukan untuk melihat analisis situasi yang ada di wilayah tersebut ditinjau dari hasil aspirasi yang ada di masyarakat.

c. Indikator Mobilisasi Para Pihak

Pemerintah Kota Depok sudah melaksanakan kegiatan pentahelix yang terdiri dari akademisi, organisasi masyarakat, media massa, pihak swasta, RT, RW serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. Hal ini sudah sesuai dengan mandat Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting bahwa Pemerintah harus melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dengan berbagai pihak untuk dapat mengatasi permasalahan stunting yang terjadi di wilayahnya.

d. Indikator Komitmen Publik dan Alokasi Sumber Daya

Pemerintah Kota Depok agar lebih memperhatikan aspek pemanfaatan anggaran dan penambahan sumber daya manusia di tingkat puskesmas, karena hal tersebut merupakan amanat Undang – Undang, yaitu Undang

– Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

e. Indikator Keberlanjutan Program

Aspek keberlanjutan program terkait percepatan penurunan stunting di kota Depok sudah dijalankan sejak lama, dengan penambahan inovasi menjadikan program tersebut tetap terus bisa dijalankan. Hal ini sesuai dengan tujuan yang dituangkan di dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2021 – 2024 dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2021 – 2026.

f. Indikator Kemauan Belajar dan Beradaptasi

Frekuensi monitoring dan evaluasi terhadap program percepatan stunting sudah dilaksanakan secara berkala dan terjadwal, namun untuk monitoring pemberian TTD masih menemui kendala yaitu belum adanya pemantauan terkait kepatuhan minum tablet tambah darah, hingga saat ini yang menjadi fokus pemberian TTD hanya distribusinya saja. Hal tersebut belum efektif dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Periode 2018 – 2024.

V.2 Saran

V.2.1 Bagi Informan

- a. Diharapkan dapat memenuhi sumber daya manusia sesuai kebutuhan untuk dapat meningkatkan keberhasilan dalam menjalankan program percepatan penurunan stunting
- b. Diharapkan dapat mengefektifkan penggunaan anggaran di tingkat puskesmas dengan melakukan pemantauan terkait pemanfaatan anggaran untuk program percepatan penurunan stunting.
- c. Diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan secara rutin serta melaksanakan monitoring terkait kepatuhan minum tablet tambah darah.

V.2.2 Bagi Institusi

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Gizi Program Sarjana agar dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Depok untuk membuat kegiatan percepatan penurunan stunting sehingga dapat meningkatkan kuantitas sumber daya manusia dalam program percepatan penurunan stunting.

V.2.3 Bagi Peneliti Lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk intervensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut dan tidak hanya membahas dari sudut pandang Dinas Kesehatan saja , namun dapat menganalisa sejauh mana kebijakan tersebut sudah berjalan serta melihat bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang kebijakan tersebut agar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut semakin baik